

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Munculnya Islam sebagai sebuah agama/kepercayaan yang *universal* dan menyeluruh/luas-membawa serta semua ajaran yang sifatnya menyeluruh dan begitu *detail*. Islam tidak hanya membawa perilaku yang dapat memberi dampak pada keberhasilan dijalankannya sebuah aktivitas atau kegiatan tersebut saja, namun juga dapat mempengaruhi hal-hal positif pada bidang lainnya.

Keinginan manusia yang tidak terbatas dan sumber daya yang dinilai cenderung mengalami kelangkaan menuntut penyelesaian ideal yang tidak dapat diselesaikan dengan Teori Umum Klasik, Neo-klasik, Keynesian maupun solusi yang coba ditawarkan oleh Marxisme (Chapra, 1997: xxvii-xxxi). Kekurangan ini dipandang menjadi jalan awal dirintisnya pemikiran-pemikiran untuk menghadirkan sebuah sistem ekonomi yang dipandang dapat menyejahterakan rakyat dengan *engover*—mengambil alih peran/menutupi kesalahan-sistem ekonomi kapitalis-sosialis yang memiliki reputasi buruk, sehingga akhirnya menjadi titik awal lahirnya sistem baru dengan prinsip keadilan serta menjunjung tinggi asas-asas kesetaraan tujuan dan peran dalam mencapai keinginan setiap individu. Sistem ekonomi ini sering dijustifikasi sebagai “Ekonomi Islam” atau *Islamic Economic* yang merujuk pada sistem, teori dan praktik perekonomian berlandaskan prinsip dan ajaran Islam.

Ekonomi Islam atau biasa disebut dengan istilah Ekonomi Syariah di Indonesia, merupakan suatu sistem perekonomian yang berdiri dengan didasarkan pada syariat Islam terakhir, yang dibawa oleh Muhammad SAW. Sistem ini mempunyai ciri khas yaitu menjalankan semua kegiatan dengan menekankan pada aktivitas ekonomi non *riba*, spekulasi, ketidakpastian (*gharar*) serta segala sesuatu yang berorientasi pada ketidakseimbangan posisi kegiatan perekonomian yang pada satu sisi dapat merugikan salah satu pihak yang terlibat di dalamnya (Belouafi dan Chaci, 2014).

Sistem Ekonomi Islam, dalam dua setengah dekade terakhir tumbuh secara eksponensial serta menjelma menjadi fenomena global ekonomi yang semakin dipandang dan ramai dijajal. Perbankan syariah tidak hanya dipandang menguntungkan, namun juga memberikan perkembangan yang menjanjikan baik dari segi permodalan, aset dan juga konsumen. Buktinya, dari Jakarta hingga ke Amman, 280 lembaga perbankan Islami bertebaran dan beroperasi di lebih dari 50 negara dengan total aset mencapai hingga \$300 miliar (Singh & Yadav, 2013; Gupta, 2015: 179). Menurut *Global Islamic Finance Report* pada 2017, aset keuangan Islam global pada tahun 2016 mencapai nilai US\$. 2,2 triliun. Menariknya, sebanyak 75% dari aset ini dipegang oleh lembaga perbankan Islam serta bank konvensional dengan jendela Islaminya (Shaikh, 2018: 27). Statistik ini mengindikasikan bahwa minat masyarakat luas sangat besar terhadap sistem ekonomi dan keuangan berbasis Islami, termasuk di lembah Hindustan dan benua Asia bagian Selatan.

Asia Selatan yang merupakan wilayah sub-benua Asia, juga dihuni oleh mayoritas penduduk yang menganut agama Islam, di samping agama Weda-atau agama Hindu-menunjukkan perkembangan perekonomian yang cukup signifikan. Hal tersebut tergambar lewat perbandingan jumlah populasi dan GDP yang dimiliki oleh masing-masing negara pada kawasan ini:

**Tabel 1. 1**

**Tingkat Populasi Muslim Negara-negara Asia Selatan**

<b>Negara</b>	<b>Populasi Muslim</b>	<b>Persentase Muslim</b>	<b>Persentasenya pada Populasi Muslim Dunia</b>	<b>Sumber dan Tahun</b>
<b>Afghanistan</b>	28.072.000	99,7%	1,8%	*WRD 2005
<b>Banglades</b>	145.312.000	89,6%	9,3%	<i>Census</i> 2001
<b>Bhutan</b>	7.000	1,0%	<0,1%	WRD 2005
<b>India</b>	160.945.000	13,4%	10,3%	WRD 2005
<b>Maladewa</b>	304.000	98,4%	<0,1%	WRD 2005
<b>Nepal</b>	1.231.000	4,2%	0,1%	<i>Census</i> 2001
<b>Pakistan</b>	174.082.000	96,3%	11,1%	<i>Census</i> 1998
<b>Sri Lanka</b>	1.711.000	8,5%	0,1%	<i>Census</i> 2001

\*WRD: *World Religion Database*

Sumber: *Pew Research Center*.

**Tabel 1. 2**  
**Tingkat GDP Negara-negara Asia Selatan (2017)**

<b>Negara</b>	<b>Ibu Kota</b>	<b>GDP</b>
<b>Afghanistan</b>	Kabul	69,550,00
<b>Banglades</b>	Dhaka	687.100,00
<b>Bhutan</b>	Thimphu	7.030,00
<b>India</b>	New Delhi	9.459.000,00
<b>Maladewa</b>	Malé	6.887,00
<b>Nepal</b>	Kathmandu	78.590,00
<b>Pakistan</b>	Islamabad	1.057.000,00
<b>Sri Lanka</b>	Kolombo	274.700,00

Sumber: *The World Factbook*, 2017 (Disajikan dalam juta USD)

Dari data yang disajikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa wilayah Asia Selatan menunjukkan pangsa pasar perekonomian yang menjanjikan. Selain dari sektor ekspor-impor, pertumbuhan ekonomi juga diwakili oleh peningkatan pendapatan dalam negeri (sektor permintaan domestik). Kondisi pemerintahannya yang relatif stabil membawa angin segar dalam proses masuknya investor untuk masuk menanamkan dananya. Dilansir oleh *Talking of Money*, ekonomi Asia Selatan diprediksi memiliki masa depan yang cerah. Tingkat GDP masing-masing negara yang ditotalkan secara keseluruhan, terus mengalami peningkatan menjadi alasan dari hal ini. Contohnya, dalam masa perkembangan 2 tahun dari periode 2013 hingga tahun 2015, perekonomian mengalami kenaikan marginal dari angka 6,2% menuju 7%, kenaikan ini

diprediksi akan terus berlanjut bahkan hingga mencapai angka 7,5% di tiga tahun setelah itu, yaitu pada 2018.

Pengembangan ekonomi Islam terutama pada sektor keuangan Islam, menanti adanya peran dari pengadaan sistem perbankan Islam. India yang berdasarkan statistik lembaga survei dunia, *Pew Research Center* (2011: 11)- dihuni oleh sekitar 177,29 juta jiwa penduduk Muslim sebenarnya merupakan pasar yang signifikan bagi pengadaan hal tersebut. Namun, negara dengan populasi Muslim terbanyak ketiga di dunia ini masih mengoperasikan keuangan Islam dalam model institusional non-bank. Alasannya ialah dikarenakan sisi regulasi negara India belum memungkinkan dan mendukung untuk melakukan adaptasi sistem perbankan Islam. Dalam hal ini, Undang-undang Perbankan India tidak dapat mengakomodasi penyediaan operasinya (Haque dkk., 2017: 80). Pemerintahan dan konstitusinya yang mantap dengan ideologi pemerintahan sekuler juga menjadi dalih yang digunakan untuk menjelaskan keadaan ini (Singh dan Yadav, 2013). Kondisi ini ditunjukkan dengan statistik yang ditunjukkan oleh data dari proyek penelitian yang disponsori oleh *King Abdulaziz University of Jeddah*, bahwa tercatat ada lebih dari 300 lembaga keuangan Islam yang beroperasi di India. Mereka bukan bank, namun bertindak sebagai substitusi dari bank (Bagsiraj, 2002: 169).

Kondisi yang serupa juga terjadi di Bhutan dan Nepal, yang masing-masing dihuni oleh sekitar 7 ribu dan 1,231 juta penduduk Muslim. Meskipun banyak kalangan dari umat Hindu dan Buddha yang melarang pemungutan riba dan bunga, pada kedua negara ini, perbankan Islam juga belum diadaptasi

dan dioperasikan (Haque, n.d.). Kondisi ini dapat diamati dari laporan dan statistik perbankan dari bank sentral masing-masing negara, Royal Monetary Authority of Bhutan (RMAB) Nepal Rastra Bank (NRB). Dari total 28 lembaga perbankan komersial yang beroperasi di negara sekuler-demokrasi Nepal dengan total aset sebesar Rs. 2.621,23 miliar per-juli 2017, tidak ada yang beroperasi atau memberikan layanan perbankan Islam, baik secara penuh maupun melalui model *Islamic Windows* (NRB, 2017; Aljazeera, 2015). Demikian juga dengan di Bhutan, sektor perbankan dari negara berkonstitusi demokrasi konstitusional berprinsip "*Buddhist Philosophy*" atau Filsafat Buddha ini beroperasi lewat 5 bank komersial. Bank-bank tersebut beroperasi dengan total aset sebesar Nu.121,05 miliar (sekitar US\$.1,70 miliar) per-juni 2017 ini tidak ada yang memberikan layanan perbankan Islam (RMAB, 2017; The Kingdom of Bhutan, 2008).

Hal tersebut dapat dijelaskan dengan beberapa kondisi, mengingat statistik kependudukan yang menunjukkan bahwa masing-masing negara hanya memiliki penduduk Muslim dengan persentase 1% dan 4,2% dari total penduduknya. Berdasarkan data yang disajikan pada data dari Divisi Riset PBB, kedua negara ini juga merupakan negara yang masuk ke dalam daftar 24 negara dengan tingkat literasi rendah di bawah 60%, yakni 56% dan 57% (Shaikh, 2010: 19). Dengan tingkat literasi yang rendah tersebut, dapat menyebabkan serangkaian informasi dan pengetahuan masyarakat setempat tentang perbankan Islam menjadi tidak maksimal. Kondisi semacam ini dapat

dijadikan sebagai sebagian kecil faktor dan alasan di balik belum dioperasikannya sistem perbankan Islam di kedua negara ini.

Pada sisi yang lain, sektor perbankan Islam merupakan salah satu bidang/sistem yang baru di negara Afghanistan, Maladewa dan Sri Lanka. Afghanistan mulai memperkenalkan sistem perbankan Islam secara penuh pada tahun 2018, lewat pemberian izin operasional dari bank sentralnya, *Da Afghanistan Bank* kepada *Islamic Bank of Afghanistan* (IBA) yang sebelumnya beroperasi di bawah sistem konvensional dengan nama *Bakhtar Bank* (Vizcaino, 2018). Selain itu, juga terdapat 2 dari 3 bank nasional milik negara (*state-run banks*) yang menyediakan layanan perbankan Islam, yakni *Milli Bank* dan *New Kabul Bank*. Bank nasional lainnya, yaitu *Pashtany Commercial Bank* telah menyatakan minatnya untuk mengikuti dua bank tersebut, yang per-Desember 2018 masih tergambar lewat laman yang diterbitkan di situs mereka yang berjudul “*Islamic Banking*” dengan keterangan “*Coming soon...*”. *Islamic Windows* lainnya juga datang dari bank konvensional swasta seperti *Ghazanfar Bank*, *Maiwand Bank*, *Afghan United Bank* dan bank Internasional, *Afghanistan International Bank* (Pajhwok Afghan News, 2018; Pashtany Bank, n.d.).

Demikian halnya dengan Maladewa. Bagi negara yang 98,4%-nya populasinya merupakan Muslim ini, perbankan Islam juga merupakan hal yang baru. Maladewa hanya memiliki 7 bank komersial yang beroperasi di wilayahnya, bank-bank tersebut terdiri dari 1 bank komersial domestik, 4 cabang dan 1 anak perusahaan dari bank asing dan 1 bank Islam penuh. Pasca

diperkenalkannya UU. Perbankan Islam 2011 oleh *Maldives Monetary Authority* atau bank sentral Maladewa, bank Islam penuh pertama dan satu-satunya di Maladewa yakni *Maldives Islamic Bank* juga didirikan pada tahun yang sama. Pada tahun 2013, layanan perbankan Islam sebagai *Islamic Windows* dari bank konvensional pertama dan satu-satunya di Maladewa juga dioperasikan, setelah *Bank of Maldives Ltd.* juga memperoleh izin operasional dari bank sentral Maladewa (Suleman, 2016: 2-4). Hingga saat ini, perbankan Islam hanya beroperasi pada 2 lembaga tersebut.

Sri Lanka sebagai negara dengan konstitusi demokrasi sosial (*democratic-socialist*) yang identik dengan agama Buddha, telah menerapkan sistem perbankan Islam pada sektor perbankannya. Pada negara yang menurut *Pew Research* (2011) dihuni oleh sekitar 1,725 juta penduduk Muslim ini, perbankan Islam beroperasi dalam dua model, yakni: Bank Islam penuh dan jendela Islam dari bank konvensional, dengan total aset mencapai kurang lebih sebesar US\$.3,9 miliar. *Amana Investment Ltd.* (AIL) yang telah mendulang sukses dalam sektor keuangan Islam umum selama belasan tahun, di bawah naungan UU. Perbankan Sri Lanka No. 30 Tahun 1988, mendapatkan izin operasional untuk beroperasi sebagai bank Islam penuh (*full-fledged*) pertama dan satu-satunya hingga saat ini (terhitung, per-Desember 2018) di Sri Lanka, dengan nama *Amana Bank Limited* atau ABL (Nafees, dkk., 2018: 59). Selain itu, juga ada lembaga perbankan konvensional yang membuka layanan dan produk perbankan Islam, seperti: *An-Noor Islamic Banking Unit* dari *Bank of Ceylon* (BOC), *Al-Adalah Islamic Banking Unit* dari *Commercial Bank of*



*Ceylon Sri Lanka (CBOC), Hatton National Bank PLC (HNB) dan MCB Islamic Banking Division* dari *MCB Bank Sri Lanka* atau *MCBBSL* (Begum, 2014: 20).

Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk memilih Pakistan dan Bangladesh sebagai wilayah yang menjadi objek kajian. India, meskipun didukung kondisi pasar potensial bagi perbankan Islam, namun tidak didukung oleh kondisi regulatif yang memungkinkan penerapannya, sehingga tidak ada satu pun bank Islam yang beroperasi di wilayah tersebut bahkan hingga saat ini. Hal yang sama juga terjadi di Bhutan dan Nepal, di mana sampai sekarang belum ada lembaga perbankan Islam-baik secara penuh maupun melalui jendela Islam dari bank konvensional-di wilayah yang identik dengan prinsip *Buddhisme* ini. Dalam kasus Afghanistan, Maladewa dan Sri Lanka, perbankan Islam telah diterapkan pada sektor perbankannya. Akan tetapi, sistem dan konsep ini masih tergolong baru diterapkan bahkan masih memiliki tingkat institusional dan koporatif yang secara statistis sangatlah sedikit. Di sisi lain, Pakistan dan Bangladesh merupakan negara dengan rekam jejak perbankan Islam yang sudah lama dan cukup berpengalaman. Bahkan kedua negara ini bahkan sering diarahkan sebagai negara-negara pertama di dunia yang menerapkannya. Secara statistuk, kedua negara ini juga berpengalaman disebabkan pengalaman operasional selama puluhan tahun dioperasikan., yang nantinya akan dijabarkan lebih lanjut pada proses penelitian.

Pakistan, salah satu bagian dari Asia Selatan yang memiliki populasi penduduk yang mayoritas menganut agama Islam, merupakan salah satu pionir dari penerapan ekonomi Islam di dunia. Alasannya karena, ketika masa-masa awal wacana tentang ekonomi Islam kembali mencuat, Pakistan secara tegas menyatakan dirinya sebagai negara yang menerapkan sistem perekonomian berbasis Islam dan bersifat *non-ribawi*. Kebijakan pemerintah yang menuntut dilakukannya pembersihan sistem ekonomi yang mengandung *riba*, membuat beberapa bank Islam akhirnya lahir, baik secara murni maupun melalui rahim *Islamic Windows*-sisi syariah dalam lembaga konvensional.

**Tabel 1. 3**

**Beberapa Lembaga Keuangan Islam yang Beroperasi di Pakistan**

<b>Lembaga</b>	<b>Debut Operasional</b>	<b>Keterangan lembaga</b>
<i>Meezan Bank Limited</i>	2002	Bank Islam terbesar dan pertama, dengan jaringan berupa 600 cabang pada sekitar 159 wilayah di Pakistan
<i>Dubai Islamic Bank Pakistan</i>	2006	Bank Islam asal Uni Emirat Arab yang membuka cabang di Pakistan, dilengkapi dengan fitur layanan modern, salah satunya <i>Priority and Platinum Card</i>

<b>Lembaga</b>	<b>Debut Operasional</b>	<b>Keterangan lembaga</b>
<i>Al-Baraka Bank</i>	2010	Lembaga keuangan perbankan berbasis syariah yang lahir dengan predikat sebagai hasil <i>merger</i> pertama dalam konteks syariah, antara cabang <i>Al-Baraka</i> Bahrain bersama tiga bank lain, yang kemudian belakangan kembali melakukan merger kedua pada bulan September 2016.
<i>BankIslami Pakistan Limited</i>	2006	Berbasis di Karachi, menjadi penerima lisensi syariah pertama dengan 213 cabang yang beroperasi di berbagai wilayah dalam negara.
<i>Askari Bank Ltd.</i>	2006	Lahir dari rahim <i>Islamic Windows</i> , mulai menawarkan produk berbasis syariah pada 2006, dengan varian layanan mulai dari produk simpanan dengan skema deposito berjangka, giro serta tabungan hingga produk

<b>Lembaga</b>	<b>Debut Operasional</b>	<b>Keterangan lembaga</b>
		pembiayaan kendaraan bermotor melalui akad berbasis <i>syirkah-kongsi</i> .

Sumber: Disajikan dari gabungan beberapa artikel situs, di antaranya: *Askaribank Limited – Islamic - Overview* (n.d.)

Sebagai negara Islam seutuhnya, Pakistan menetapkan proyek Islamisasi dengan berbagai kontroversi serta diwarnai beberapa protes-dikarenakan menjadi bagian dari proyek Islamisasi dan pembentukan negara Islam- dan penolakan pada masa-masa awalnya. Sebab, banyak pihak yang merasa proyek semacam ini akan menyebabkan timbulnya rasa diskriminasi dan ketidakadilan pada eksistensi masyarakat. Namun, di balik misi sekuler dari pihak-pihak yang memerintah di awal berdirinya negara ini, ekonomi Islam terus bergerak dan diperjuangkan. Hingga pada akhirnya, pihak pemerintah mengakui sistem ini secara penuh saat pemimpin yang *pro*-atau mendukung-Islam, menjabat kemudian membuat kebijakan ekonomi Islami berhasil diterapkan (Thohir dan Kusdiana, 2006: 257-289).

Setelah keberhasilan tersebut, masalah tidak berhenti hanya sampai di situ, negara ini masih memiliki permasalahan lain yang tampaknya masih berakar dari penolakan di masa-masa awal. Permasalahan bentuk dari *riba* yang dilarang dan eksistensi lembaga perbankan yang beroperasi dengan sistem bunga, turut serta dalam perkembangan perekonomian negara ini (Ali,

2014: 3). Meskipun demikian, ekonomi Islam tetap hidup dan mengalami berbagai peningkatan positif yang signifikan. Perkembangan ini tidak hanya menysar permasalahan riba dan ekonomi, namun juga sudah memasuki sektor lain, baik sosial maupun perbankan.

Banglades yang merdeka dari Pakistan pasca perang segitiga yang melibatkan India dan Pakistan (Timur dan Barat), bangkit dari keterpurukan ekonomi lewat peran dari pemikir Muslim, bernama Muhammad Yunus melalui *Grameen Bank* yang didirikan atas konsep pemikirannya. Dengan memberikan kredit tanpa jaminan, lembaga ini berhasil membawa Banglades bangkit dari krisis pasca kemerdekaan (Yunus, 2007). Keberhasilan Yunus dan *Grameen* membawa implikasi bahwa, perekonomian yang masuk dalam konteks kemanusiaan dan keadilan praktis mampu membawa perubahan besar dalam perekonomian suatu negara.

Bank Syariah yang sudah dikenalkan di Banglades sejak 1983, mengalami perkembangan yang baik dan fleksibel (minanews.net, 2017). Pernyataan ini terbukti lewat masih eksisnya 8 Bank Islam independen. Selain itu, juga terdapat 4 bank konvensional yang memutuskan untuk membuka cabang Syariah diiringi dengan 2 bank yang membuka unit usaha Islam melalui *Islamic Windows Banking*. Keberhasilan ini tidak lain karena perkembangan ekonomi Islam di Banglades memang didominasi oleh sektor perbankan.

Tabel 1. 4

## Beberapa Lembaga Keuangan Islam yang Beroperasi di Banglades

Lembaga	Debut	Keterangan lembaga Operasional
<i>Islamic Bank of Bangladesh</i>	1983	Memiliki lebih dari ratusan cabang sebagai perseroan terbatas publik dan bank multinasional patungan
<i>Al-Arafa Islami Bank Limited</i>	1995	Didirikan dan mulai beroperasi pada 1995 yang saat ini berkembang dengan mengakuisisi beberapa lembaga lainnya
<i>Prime Bank Ltd</i>	1995	Lahir dari rahim <i>Islamic Windows</i> , PBL memberikan layanan-layanan keuangan syariah mulai dari simpanan hingga investasi.
<i>Shahjahal Islami Bank Limited</i>	2001	Berbasis di Dhaka, <i>Shahjahal Islami Bank</i> menjalankan kegiatan operasional dengan menawarkan semua jenis produk dan layanan perbankan

<b>Lembaga</b>	<b>Debit</b>	<b>Keterangan lembaga</b>
----------------	--------------	---------------------------

**Operasional**

komersial kepada pelanggan termasuk pengambilan deposito, investasi hingga pembiayaan dan perdagangan.

Sumber: Lewis & Algaoud (2007); *Assignment Point – Report on Introduction to Islamic Banking* (n.d.); *Prime Bank Limited – Islamic Banking* (n.d.)

Selain itu, hal lainnya yang menarik perhatian ialah banyaknya pemikir-Muslim dan cendekiawan-cendekiawan ekonomi dan perbankan Islam yang lahir di lembah Hindustan ini. Di antaranya muncul nama-nama seperti: Muhammad Nejatullah Siddiqi yang telah mengemukakan serangkaian pemikiran revolusioner, yang banyak di antaranya sudah hadir dalam bentuk-sekitar 55 buah-buku, artikel dan laporan yang ditulis pada tahun 50 hingga awal 70-an (Saeed A., 2008: 17). Ada juga nama lain, yaitu Umer Chapra (Pakistan), seorang ahli ekonomi yang saat ini menjadi warga negara Saudi Arabia. Peraih *King Faisal Internasional Prize* dalam bidang Studi Islam ini, aktif sebagai aktivis kelembagaan ekonomi Islam dan juga sebagai pengajar di beberapa universitas ternama di dunia. Pencetus *Grameen Bank*-lembaga keuangan *microfinance* yang terkenal dengan pinjaman tanpa jaminan-Muhammad Yunus (Banglades) juga berasal dari wilayah ini. Begitu juga nama-nama lain seperti: Shah Abdul Mannan (Banglades), A.A. Maududi

(Pakistan), M. Iqbal (Kemaharajaan Britannia). Dengan kondisi ini tentunya akan menarik bila dapat mencari tahu bagaimana perkembangan perbankan Islam di negara-negara tersebut. Selain itu, juga menjadi tanda tanya yang besar mengapa perkembangan ekonomi Islam mengalami perkembangan yang lebih pesat dan maju di kawasan Asia Tenggara (khususnya Malaysia) serta Timur Tengah bukan di Asia Selatan. Alasan di balik serangkaian statistik dan performa dari perkembangan yang ada di Pakistan dan Banglades akan sangat menarik untuk dicari tahu, mengingat matahari ekonomi dan perbankan Islam banyak terbit dari balik tanah wilayah ini.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam rangka pengembangan ekonomi Islam khususnya pada sektor perbankan, baik di Pakistan maupun di Banglades wilayah lainnya secara seluruhnya. Dengan hal tersebut, diharapkan juga dapat membawa studi dan penerapan ekonomi Islam di menjadi lebih baik, dengan pengimplementasian sistem yang sepenuhnya berasal dari Syariat. Mengingat syariat Islam dapat membawa maslahat, tidak hanya bagi Muslim, namun juga bagi pihak lain yang berkomitmen dan percaya dengan kebaikan yang ada padanya.

Pentingnya penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka melakukan pendeskripsian serta melakukan analisis komparatif dari perkembangan perbankan Islam yang ada di negara Pakistan dan Banglades. Sebab, menurut Siddiqi dijelaskan dalam Priambodo (2012: 3) faktor penentu dari perkembangan pesat yang dialami oleh ekonomi Islam ialah semakin banyaknya bank Islam yang beroperasi. Dalam rangka melengkapi



pembahasan penelitian ini, penulis juga menyertakan profil dari tiga negara terkait baik secara umum maupun dari segi kondisi perekonomiannya. Dengan mempertimbangkan dan memperhatikan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dirangkai dalam judul “**Analisis Deskriptif Komparatif Perkembangan Perbankan Islam di Pakistan dan Banglades**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan penelitian yaitu:

1. Bagaimana deskripsi perkembangan perbankan Islam di Pakistan dan Banglades?
2. Bagaimana komparasi atau perbandingan perbankan Islam di Pakistan dan Banglades?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah tersebut, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui sejarah perkembangan perbankan Islam di negara Pakistan dan Banglades
2. Mengetahui perbandingan antara perkembangan perbankan Islam di Pakistan dan Banglades

#### **D. Batasan Penelitian**

Agar penelitian ini lebih fokus pada permasalahan yang telah dirumuskan. Peneliti membuat batasan-batasan penelitian sebagai berikut:

1. Permasalahan yang dibahas adalah perbankan Islam di negara Pakistan dan Banglades, tidak berhubungan dengan perkembangan-perkembangan pada sektor dan wilayah yang lain.
2. Perkembangan kelembagaan yang dibahas adalah perkembangan dari pilar utama dalam proses perkembangan ekonomi Islam yaitu sektor perbankan berbasis syariah (perbankan Islam) di negara Pakistan dan Banglades.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi sekaligus bahan yang dapat mendukung pengembangan, penelitian dan kajian yang selanjutnya serta berkontribusi dalam upaya pengembangan ilmu ekonomi dan perbankan Islam, bagi peneliti maupun pembaca yang ingin melakukan atau melanjutkan penelitian dengan jenis pembahasan yang sama atau terkait.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membawa dampak, manfaat serta membawa *kemashlahatan* baik bagi praktisi yang berkiprah langsung, maupun akademisi yang terjun dalam praktik pengembangan perbankan Islam di atas kertas.

## F. Sistematika Pembahasan

Dengan tujuan menghadirkan penelitian yang mudah untuk dipahami, maka penulis akan memberikan gambaran dan penjabaran terkait bab-bab serta sub-bab dan bagian-bagiannya yang terdapat dalam penelitian ini:

*Bab Pertama*, akan menjelaskan tentang pendahuluan dari penelitian yang berisikan pembahasan latar belakang masalah beserta rumusan masalah, tujuan penelitian serta manfaatnya.

*Bab Kedua*, mencakup penelitian terdahulu serta tinjauan teoritis yang mengandung teori-teori serta penjelasan terkait instrumen-instrumen atau variabel yang memiliki keterkaitan atau berhubungan langsung dengan penelitian, yang termasuk ke dalam Bab besar Tinjauan Pustaka.

*Bab Ketiga*, berisi penjelasan mengenai metodologi yang terdiri atas jenis, sifat serta data yang digunakan dalam penelitian beserta cara analisis serta semua hal yang terkait dengan sistematika penyusunan/penulisan.

*Bab Keempat*, akan mencakup penyajian, penjelasan serta pembahasan yang telah dilakukan pasca proses-proses penelitian yang dilakukan.

*Bab Kelima*, menyimpulkan atau melakukan *retelling*-mengungkapkan ulang-terhadap keseluruhan isi penelitian beserta hal-hal yang disarankan.